

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, Bencana merupakan peristiwa atau suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bencana alam merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non-alam antara lain berupa penyakit, gagal teknologi, modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dengan seringnya terjadi bencana di seluruh Indonesia, menjadi tantangan bagi masyarakat saat menghadapi situasi darurat Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dll. 1



Gambar I. 1 Jumlah Provinsi Bencana Alam

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan frekuensi terjadinya bencana alam yang tinggi. Banjir sering terjadi pada wilayah perkotaan yang diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan, buruknya sistem drainase, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Longsor yang begitu sering terjadi pada daerah perbukitan yang terutama disebabkan karena curah hujan tinggi selama musim hujan. Selain itu, ancaman gempa bumi yang dapat terjadi secara mendadak menambah kompleksitas penanganan bencana.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan gerakan yang strategis dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. BPBD berfungsi untuk melakukan pencegahan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap risiko bencana dan cara mitigasi, melakukan koordinasi berupa penyelamatan dan evakuasi saat terjadinya bencana dan memfasilitasi pemulihan infrastruktur serta ekonomi sosial masyarakat pascabencana.

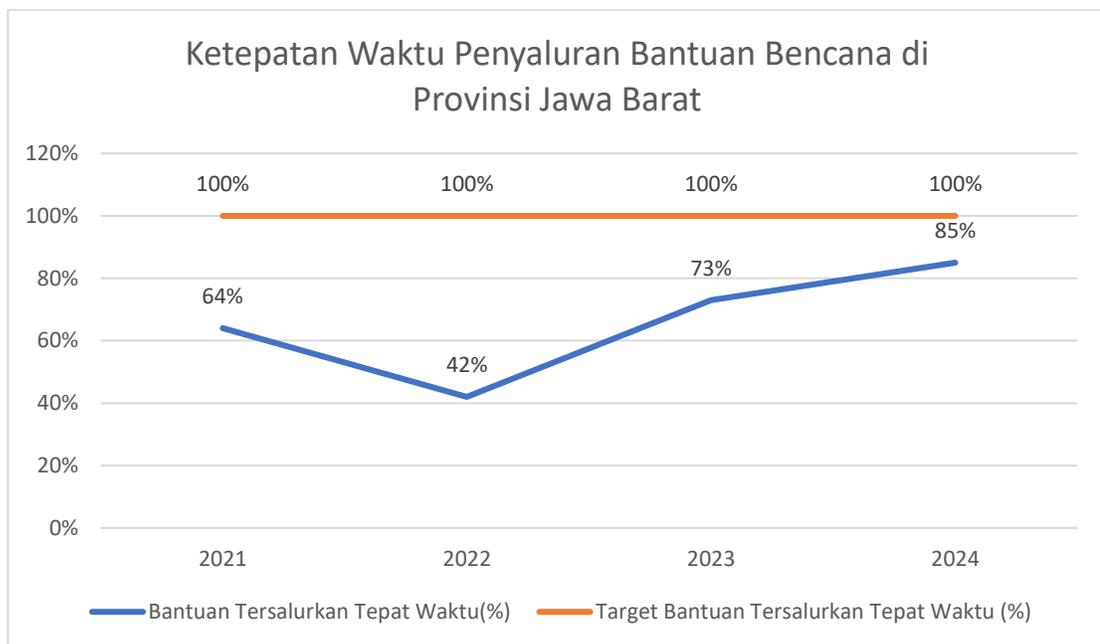


Gambar I. 2 SOP Distribusi Bantuan Logistik di BPBD Jawa Barat

Sumber: Data Internal Perusahaan (2024)

Berdasarkan Gambar I. 2 menunjukkan proses distribusi bantuan Logistik yang dilakukan oleh BPBD Jawa Barat untuk mendistribusikan barang ke lokasi terdampak. BPBD memiliki banyak sekali pemangku kepentingan dalam alur prosesnya. Setiap

pemangku kepentingan harus berkoordinasi setiap saat untuk dapat memasok barang dan mengirimkan bantuan secara tepat waktu. Dengan penerapan *Standar Operating Procedure* dalam manajemen rantai pasok distribusi membuat kinerja menjadi efektif. Meskipun seperti itu, banyak tantangan yang dihadapi oleh BPBD dalam upaya menanggulangi bencana. Permasalahan seperti waktu respon yang lambat, koordinasi yang kurang baik, keterbatasan infrastruktur, dan konektivitas transportasi yang kurang menghambat BPBD dalam melaksanakan tugasnya. BPBD harus dapat mengidentifikasi indikator untuk mengukur kinerja yang ada.



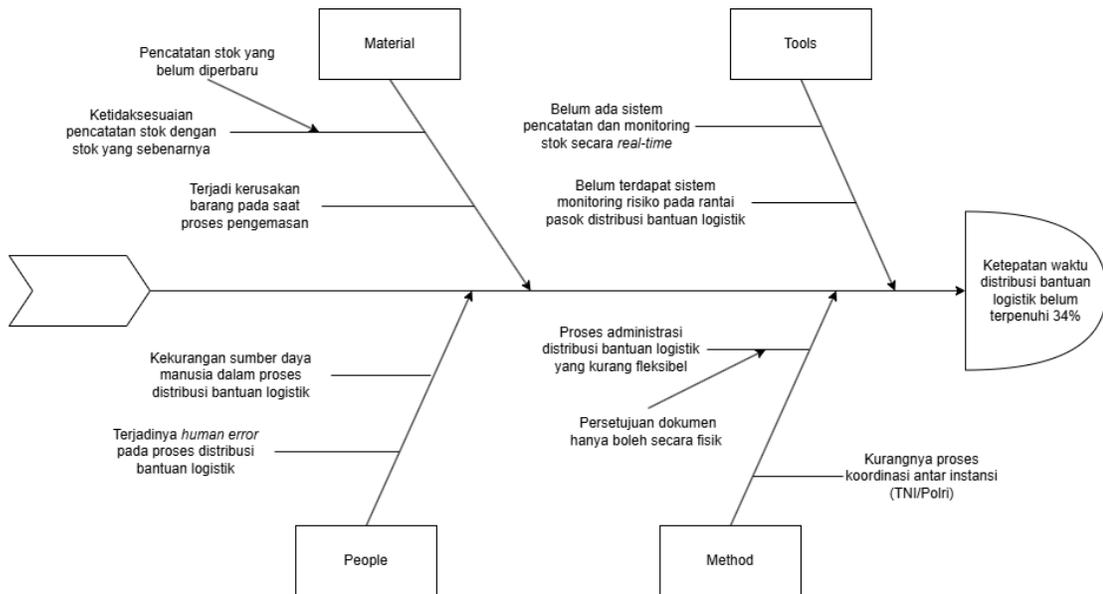
Gambar I. 3 Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan

Sumber: Data Internal Perusahaan (2021-2024)

Gambar I.3 merupakan bukti penyaluran bantuan logistik di Provinsi Jawa Barat yang belum tepat waktu selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021 realisasi ketercukupan penyaluran mencapai 64%. Pada tahun 2022 realisasi ketercukupan penyaluran mencapai 42%. Pada tahun 2023 realisasi ketercukupan penyaluran mencapai 73%. Pada tahun 2024 realisasi ketercukupan penyaluran mencapai 85%. Terdapat peningkatan ketepatan waktu penyaluran bantuan yang cukup signifikan sejak tahun 2022 namun belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 4 tahun

terakhir bantuan yang disalurkan masih belum tepat waktu berdasarkan target pemenuhan kebutuhan korban terdampak yaitu 100%. Namun, adanya gap pada permasalahan yang terjadi yaitu tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh Lembaga terkait.

Hal ini relevan dengan hasil wawancara tanggal 30 Desember 2024 dengan kepala bagian bidang logistik dan distribusi BPBD Jawa Barat, sering kali bantuan tidak tersalurkan sesuai waktu yang ditentukan karena adanya risiko-risiko yang terjadi di proses distribusi namun tidak ada sistem monitoring untuk risiko-risiko tersebut. Kesenjangan yang cukup signifikan pada gambar I.3 membuktikan bahwa distribusi bantuan logistik tidak tepat waktu.



Gambar I. 4 *Fishbone Diagram*

Mempertimbangkan ruang lingkup BPBD Provinsi Jawa Barat yang penuh dengan kebutuhan darurat saat terjadinya bencana, waktu respons cepat yang dibutuhkan dalam menanggapi terjadinya bencana dan tantangan kinerja umum lainnya yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Jawa Barat, diperlukan pendekatan sistematis untuk menganalisis proses distribusi bantuan logistik. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko serta merancang strategis mitigasi yang efektif.

Strategi dan analisis yang dilakukan menggunakan pemodelan SCOR 12.0 *Racetrack* untuk menganalisis proses rantai pasok yaitu *plan, source, make, deliver, return, dan enable*). Pemodelan SCOR memungkinkan identifikasi gap kinerja serta analisis akar masalah yang dapat didefinisikan sebagai potensi risiko. Kemudian dilakukan identifikasi risiko serta pembobotan risiko yang kemudian akan dilakukan penilaian risiko menggunakan metode *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA) untuk merancang strategi mitigasi risiko yang terukur dan tepat sasaran.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana rancangan strategi mitigasi risiko untuk mengatasi risiko dalam proses distribusi bantuan logistik dan rancangan sistem *monitoring* dapat dikembangkan untuk mendukung pemantauan strategi mitigasi secara efektif dan efisien di BPBD Provinsi Jawa Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi risiko yang terdapat pada proses distribusi bantuan logistik BPBD Provinsi Jawa barat
2. Menghasilkan usulan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi risiko yang terdapat pada proses distribusi bantuan logistik BPBD Provinsi Jawa Barat
3. Menghasilkan usulan rancangan sistem *monitoring* risiko untuk memantau risiko-risiko yang ada pada proses distribusi bantuan logistik BPBD Provinsi Jawa Barat

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, dapat mengetahui risiko-risiko apa saja yang terdapat pada rantai pasok distribusi bantuan logistik BPBD Provinsi Jawa Barat. Strategi mitigasi risiko yang diusulkan pada penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menghadapi faktor risiko yang ada. Tidak hanya itu,

rancangan sistem *monitoring* risiko yang diusulkan juga dapat digunakan oleh perusahaan apabila perusahaan perlu menerapkan sistem *monitoring*, terutama pada distribusi bantuan logistik di BPBD Provinsi Jawa Barat

2. Bagi Akademik, dapat memberikan pemahaman terkait perancangan sistem mitigasi risiko sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

I.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan untuk mendukung penelitian beserta pemilihan dan alasan pemilihan metode yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB III METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH

Bab ini berisikan sistematika penyelesaian masalah, identifikasi sistem terintegrasi, dan Batasan dan asumsi penelitian

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan pengumpulan dan pengolahan data menggunakan metode yang ditentukan untuk mendapatkan hasil penelitian untuk dianalisis.

BAB V ANALISIS

Bab ini berisikan verifikasi dan validasi dari hasil rancangan penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil analisis.

BAB II LANDASAN TEORI

II.1 Literatur Terkait

II.1.1 *Supply Chain Management*

Menurut (Radhi & Hariningsih, 2019) *Supply Chain Management* (SCM) atau manajemen rantai pasok merupakan suatu koordinasi strategis dari rantai pasok dengan tujuan memaksimalkan keuntungan total. Rantai pasok mencakup seluruh proses yang dimulai dari mengubah bahan mentah menjadi suatu produk serta mengelola hubungan berbagai proses bisnis Perusahaan, pemasok dan pelanggan. Manajemen rantai pasok memiliki serangkaian proses yang menggambarkan aliran pasokan antara Perusahaan dan konsumen.

Menurut (Radhi & Hariningsih, 2019) *Supply Chain Management* ialah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang dan juga toko secara efektif agar persediaan barang bisa diproduksi serta didistribusikan dengan jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, serta di waktu yang tepat sehingga biaya keseluruhan sistem bisa diminimalisir dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan dan layanan. Sedangkan menurut Ballou dalam (Riadi, 2017) *Supply Chain Management* yaitu jaringan dari organisasi-organisasi yang saling berhubungan serta saling membutuhkan satu sama lain dan juga mereka bekerjasama untuk mengatur, mengawasi, serta meningkatkan arus komoditi dan informasi semenjak dari titik pemasok hingga ke pengguna akhir. Lalu menurut (Anindita, 2019) *Supply Chain Management* merupakan rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk dengan cara seefisien mungkin dan hemat biaya.